



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BLORA

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BLORA

2022

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BLORA 2022

ISBN : -
No. Publikasi : 33160.2227
Katalog BPS : 4102004.3316
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 68 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sumber Ilustrasi:

Freepik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Nurul Choiriyati

Penyunting:

Dewi Setyowati

Penulis:

Novita Ayuningtyas

Pembuat Infografis:

Indramawan Yusuf Adi Prayoga

Martino Dwi Saputra

Desain Sampul:

Yunita Rizki Intan Sari

<https://bookstack.id>

KATA PENGANTAR

Buku **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2022** merupakan publikasi yang diterbitkan secara tahunan oleh BPS Kabupaten Blora. Publikasi ini menggunakan data yang utamanya bersumber dari publikasi Blora Dalam Angka, indikator kesejahteraan rakyat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), indikator ketenagakerjaan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta beberapa indikator strategis lainnya dari berbagai survei dan sensus.

Publikasi ini menyajikan perkembangan indikator kesejahteraan sosial yang mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar data disajikan secara *series* tahun 2018 sampai 2022 agar terlihat bagaimana tren perkembangan data-data tersebut.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan data kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Blora, September 2023
Kepala BPS Kabupaten Blora



Nurul Choiriyati, SST, M.M

DAFTAR ISI

Halaman Publikasi.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Bab I Kependudukan.....	1
Bab II Kesehatan	13
Bab III Pendidikan	25
Bab IV Ketenagakerjaan	35
Bab V Perumahan	47
Bab VI Pola Konsumsi.....	57
Bab VII Kemiskinan	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Blora, 2012-2022	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora, 2015-2022.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kecamatan, 2022.....	7
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Blora, 2016-2022.....	8
Tabel 1.5	Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Partisipasi KB, 2020-2022	10
Tabel 1.6	Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Jenis Alat/Cara, 2020-2022.....	11
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Kabupaten Blora, 2020-2022.....	16
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir, 2020-2022.....	18
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan, 2020-2022	19
Tabel 2.4	Alasan Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Saat Memiliki Keluhan Kesehatan, 2020-2022.....	19
Tabel 2.5	Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2020-2022.....	20
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI, 2020-2022.....	22
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Berusia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2020-2022	23

Tabel 2.8	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2020-2022	23
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020-2022	30
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022.....	31
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022.....	32
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022.....	33
Tabel 4.1	Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan di Kabupaten Blora, 2020-2022	38
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2020-2022.....	50
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2020-2022	50
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2020-2022	51
Tabel 5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita, 2020-2022	52
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2020-2022	53
Tabel 6.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2020-2022	60
Tabel 6.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Pengeluaran 2020-2022	61
Tabel 6.3	Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein, Lemak dan karbohidrat Perkapita Perhari 2020-2022.....	62

Tabel 7.1	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2006-2022.....	67
-----------	--	----

<https://blorakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Blora menurut Kecamatan, 2022	5
Gambar 1.2	Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2022.....	9
Gambar 2.1	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Blora, 2011-2022	16
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2020-2022	20
Gambar 3.1	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blora, 2010-2022	28
Gambar 3.2	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora, 2010-2022.....	29
Gambar 4.1	Perkembangan TPAK Kabupaten Blora, 2018-2022.....	39
Gambar 4.2	Perkembangan TPT Kabupaten Blora, 2018-2022	40
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2022	41
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2022	42
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal, 2020-2022	42
Gambar 4.6	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2022.....	43
Gambar 4.7	TPT Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2020-2022	44
Gambar 4.8	TPT Kabupaten Blora menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2022	45
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Air Minum, 2020-2022	54

Gambar 7.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2022	66
Gambar 7.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2022	67

<https://blorakab.bps.go.id>



BAB 1 KEPENDUDUKAN

KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

JUMLAH PENDUDUK

888.224 Jiwa



KEPADATAN PENDUDUK

454 Jiwa/ KM^2



100,07 RASIO JENIS KELAMIN

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.



Dalam dinamika pembangunan, penduduk merupakan subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Di sisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakekat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena posisi penduduk bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Kependudukan sendiri selalu berkaitan erat dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal atau asset pembangunan apabila memiliki kualitas yang relatif baik. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga bisa menjadi beban dalam pencapaian tujuan pembangunan apabila kualitasnya rendah. Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata secara geografis dan komposisi sosial dan budaya yang sangat beragam juga dapat menjadi hambatan dalam pembangunan apabila tidak ada pengendalian dari pemerintah.

Sementara itu, dalam program pengendalian penduduk, pemerintah selaku perencana pembangunan maupun pelaku bisnis senantiasa membutuhkan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu. Misalnya data jumlah penduduk dan karakteristik, dapat digunakan pemerintah sebagai bahan dalam perencanaan penyediaan berbagai sarana umum, seperti perumahan, tempat ibadah, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan tempat rekreasi. Sementara pelaku bisnis memerlukan data kependudukan dalam keperluan perencanaan produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja.

Kondisi Wilayah

Kabupaten Blora terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah barat, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di sebelah utara,

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan.

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Blora tercatat sebesar 182.059 hektar, dimana hampir separuhnya merupakan daerah hutan.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebanyak 888.224 jiwa. Laju pertumbuhan pertumbuhan per tahun 2020-2022 sebesar 0,25. Kepadatan penduduk per km persegi tertinggi berada di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu.

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blora dari tahun ke tahun memberikan sejumlah dampak, baik positif maupun negatif. Jumlah penduduk yang besar merupakan indikator tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai. Hal ini juga dikuatkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15 sampai 64 tahun) yang mendominasi sebesar 70,96 persen dari seluruh penduduk. Tetapi jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar juga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran apabila pertumbuhan lapangan kerja baru tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Blora, 2012-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
2012	840.206	96,95
2013	844.444	96,96
2014	848.369	96,93
2015	852.088	96,93
2016	855.573	96,93
2017	858.865	96,91
2018	862.110	96,86
2019	865.013	96,85
2020	884.333	100.15
2021	886.147	100.11
2022	888.224	100.07

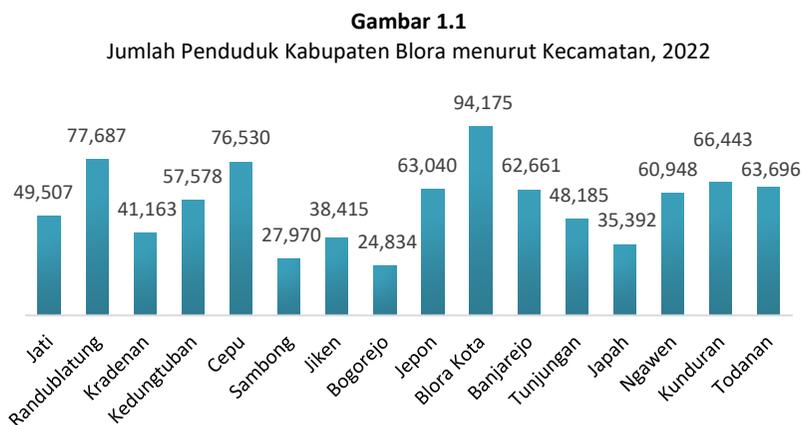
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Besaran laju pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Pengendalian penduduk yang baik akan mengurangi sejumlah permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dan aset penting dalam pembangunan. Pada periode 2020-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (LPP) Kabupaten Blora sebesar 0,25 persen. Kecamatan dengan LPP tertinggi adalah Kecamatan Sambong dan Kecamatan Todanan.

Dilihat dari komposisi jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin Kabupaten Blora tahun 2021 sebesar 100,07. Artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan, ada sebanyak 100 atau 101 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Blora sedikit lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Blora adalah Randublatung, Jati dan Jiken. Total proporsi luas ketiga kecamatan tersebut terhadap luas wilayah Kabupaten Blora yaitu sebesar 30,91 persen dengan total proporsi jumlah penduduk di ketiga kecamatan tersebut hanya sebesar 18,65 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Blora adalah Blora Kota dengan jumlah penduduk sebesar 94.175 jiwa atau sebesar 10,60 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Blora, diikuti Randublatung dan Cepu dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 77.687 jiwa (atau 8,75 persen) dan 76.530 jiwa (atau 8,62 persen). Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil ada di Bogorejo dan Sambong yang masing-masing dihuni oleh sebanyak 24.834 jiwa (atau 2,80 persen) dan 27.970 jiwa (atau 3,15 persen).

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora juga pada tahun 2021 sebanyak 487 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk turun menjadi 454 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora, 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
2015	852.088	1.820,59	468
2016	855.573	1.820,59	470
2017	858.865	1.820,59	472
2018	862.110	1.820,59	474
2019	865.013	1.820,59	475
2020	884.333	1.820,59	486
2021	886.147	1.820,59	487
2022	888.224	1.820,59	454

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Jika data kepadatan penduduk dirinci per kecamatan, maka tampak bahwa pada tahun 2022, Kecamatan Cepu dan Blora merupakan dua kecamatan terpadat di Kabupaten Blora. Kepadatan penduduk di Cepu dan Blora mencapai 1.561 jiwa per km² dan 1.302 jiwa per km². Selain kedua kecamatan tersebut, kepadatan penduduk berada di bawah 590 jiwa per km². Bahkan, ada empat kecamatan dengan kepadatan penduduk di bawah 250 jiwa per km², yaitu Jati dan Jiken yang mana mempunyai kepadatan penduduk hanya sebesar 230 jiwa per km² dan 232 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora
menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
Jati	49.507	183,62	230
Randublatung	77.687	211,13	329
Kradenan	41.163	109,50	367
Kedungtuban	57.578	109,85	631
Cepu	76.530	49,14	1.561
Sambong	27.970	88,75	272
Jiken	38.415	168,16	232
Bogorejo	24.834	49,80	408
Jepon	63.040	107,72	529
Blora	94.175	79,78	1.302
Banjarejo	62.661	103,52	566
Tunjungan	48.185	101,81	539
Japah	35.392	103,05	274
Ngawen	60.948	100,98	581
Kunduran	66.443	127,98	533
Todanan	63.696	128,73	409

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi dan rendahnya tingkat kelahiran di suatu wilayah. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Blora pada tahun 2021 sebesar 19,33 persen. Sedangkan penduduk yang berusia di atas 64 tahun ada sebesar 9,72 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Blora.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam perencanaan pembangunan. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif. Begitupun sebaliknya, semakin rendah angka beban ketergantungan maka menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus

ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Blora, 2016-2022

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun	Angka Beban Ketergantungan
2016	22,67	68,07	9,26	46,91
2017	22,37	68,11	9,52	46,82
2018	22,09	68,10	9,80	46,83
2019	21,82	68,06	10,12	46,92
2020	19,82	71,30	8,87	40,25
2021	19,50	71,02	9,48	40,57
2022	19,33	70,96	9,72	40,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Blora sedang menikmati bonus demografi dimana nilai angka beban ketergantungan selalu berada di bawah nilai 50. Pada tahun 2022, angka beban ketergantungan Kabupaten Blora sebesar 40,93. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 orang penduduk usia tidak produktif. Selain itu, bonus demografi juga ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Status perkawinan penduduk dibedakan atas belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, penduduk berstatus kawin mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Blora yaitu sebesar 64,67 persen. Jika dibandingkan antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan, persentase penduduk berstatus belum kawin lebih banyak berada pada kelompok penduduk laki-laki, yakni sebesar 31,35 persen.

Gambar 1.2

Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2022

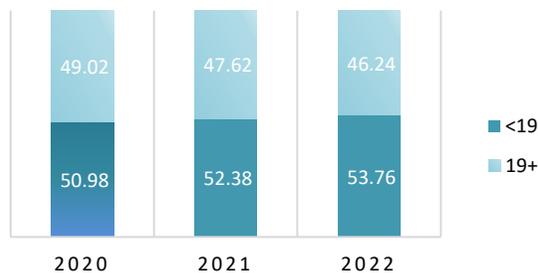


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama ini merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi. Semakin muda umur seseorang saat melakukan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang pula masa reproduksinya. Hal ini memungkinkan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Gambar 1.3

Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke atas Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia

minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan umur pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Di Kabupaten Blora, proporsi perempuan berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur kurang dari 19 tahun sebesar 46,24 persen. Dalam tiga tahun terakhir, umur perkawinan pertama lebih dari 19 tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Kabupaten Blora yang kawin di usia muda.

Penggunaan Alat/Cara KB

Sebagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penerapan program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu solusi selain dengan menunda umur perkawinan pertama. Program KB ditujukan untuk mewujudkan keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Tabel 1.5

Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Partisipasi KB, 2020-2022

Partisipasi KB	2020	2021	2022
Pernah	11,22	17,19	11,06
Sedang	64,44	62,20	69,09
Tidak	24,34	20,61	19,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 di Kabupaten Blora menunjukkan ada sebesar 69,09 persen perempuan usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin yang merupakan peserta KB aktif, yaitu mereka yang sedang menggunakan alat atau cara KB. Adapun proporsi perempuan usia subur berstatus kawin yang tidak pernah menggunakan alat atau cara KB ada sebesar 19,85 persen.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.6

Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Jenis Alat/Cara, 2020-2022

Alat/Cara Kontrasepsi	2020	2021	2022
Kontrasepsi permanen (MOW/tubektomi, MOP/vasektomi)	3,72	4,12	5,38
AKDR/IUD/Spiral	4,83	6,86	4,38
Suntikan KB	63,27	65,29	64,78
Susuk KB/Implan	13,69	14,33	10,97
Pil KB	12,05	8,72	11,17
Kondom/Karet KB/ Intravag/Tissue	0,97	0,27	0,90
Lainnya	1,46	0,41	2,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Suntik KB merupakan alat/cara KB yang paling diminati oleh peserta aktif KB. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan ada sebesar 64,78 persen peserta aktif KB yang menggunakan suntik KB. Suntik KB dikenal sebagai alat/cara KB yang relatif praktis, mudah pemakaiannya, murah, dan mudah didapatkan. Selain itu akseptor cenderung tidak malu/risih pada saat pemasangan dan mudah bagi akseptor untuk berhenti.

Sementara itu, penggunaan susuk KB/implan mengalami penurunan, dibandingkan dari tahun 2021 (yaitu 14,33 persen), menjadi sebesar 10,97 persen. Di sisi lain, alat KB praktis lainnya yaitu pil KB, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 (yaitu 8,72 persen), menjadi sebesar 11,17 persen. Penggunaan alat/cara KB yang bersifat permanen seperti MOW/tubektomi ataupun MOP/vasektomi mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya. Pengguna KB yang bersifat permanen tahun 2022 sebesar 5,38 persen.

<https://blorakab.bps.go.id>



BAB 2 KESEHATAN

KONDISI KESEHATAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)

 **74,60**  **0,09%**
dari tahun 2021

IMUNISASI LENGKAP



66,02%



PENDUDUK BEROBAT JALAN

56,47%   **27,16%**
dari tahun 2021



Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga terkait erat dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, maka akan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut.

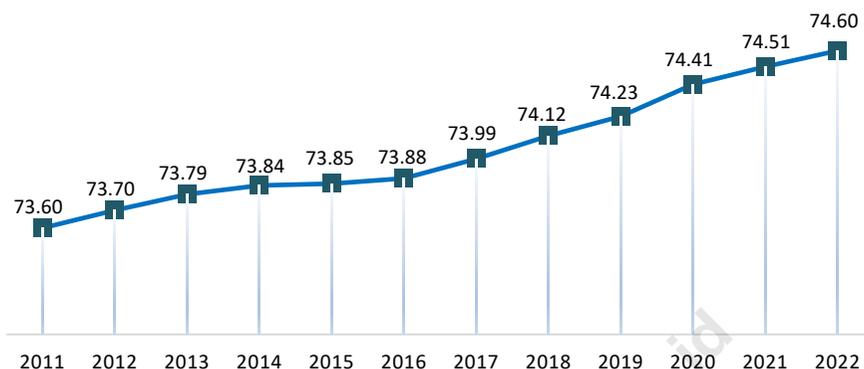
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, serta memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti angka kesakitan dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang ditolong oleh tenaga medis waktu dilahirkan, persentase penduduk yang berobat ke pusat pelayanan kesehatan, dsb.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari sejumlah indikator, di antaranya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. UHH atau *Life Expectancy* (e^0) didefinisikan sebagai rerata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Hasil Susenas Maret 2022 di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mana ditandai dengan peningkatan UHH di Kabupaten Blora. BPS mencatat bahwa UHH Kabupaten Blora 2011 sebesar 73,60 tahun dan telah meningkat menjadi 74,60 tahun di 2022.

Gambar 2.1
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Blora, 2011-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Peningkatan UHH ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dilakukan pemerintah dengan turut serta menggandeng peran aktif masyarakat dan swasta.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Kabupaten Blora, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
% Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan			
Laki-Laki	44,98	29,67	45,35
Perempuan	47,04	29,76	47,60
Laki-Laki + Perempuan	46,03	29,72	46,47
Angka Kesakitan			
Laki-Laki	23,54	14,49	15,58
Perempuan	24,45	13,37	16,98
Laki-Laki + Perempuan	24,00	13,92	16,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), *morbidity rate* atau angka kesakitan merupakan persentase

penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir yang didekati dengan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan merasa aktivitas sehari-harinya terganggu karena keluhan kesehatannya tersebut. Pada tahun 2022, angka kesakitan penduduk Kabupaten Blora sebesar 16,28 persen. Angka kesakitan juga menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Pada tahun 2022, sebesar 46,47 persen penduduk Kabupaten Blora memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Proporsi perempuan yang memiliki keluhan kesehatan lebih besar nilainya dibandingkan proporsi laki-laki yang memiliki kesehatan, yaitu 47,60 persen berbanding 45,35 persen.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga turut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan tersebut dapat berupa rumah sakit, puskesmas, pustu maupun praktik tenaga kesehatan lainnya. Beberapa hal dapat menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan sarana kesehatan ini, diantaranya adalah jarak tempat tinggal ke sarana kesehatan, ketersediaan biaya dan kualitas pelayanan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan ini adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2
 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan
 dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir, 2020-2022

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-laki	41,26	25,02	53,92
Perempuan	44,38	33,46	58,90
Laki-Laki + Perempuan	42,88	29,31	56,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa 56,47 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian melakukan berobat jalan. Proporsi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 29,31 persen. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa proporsi perempuan yang berobat jalan lebih besar dibandingkan proporsi penduduk laki-laki yang berobat jalan.

Salah satu faktor yang mendorong penduduk dengan keluhan kesehatan untuk mempertimbangkan keputusan berobat jalan adalah ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan, seperti jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2.3
 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan,
 2020-2022

Tempat Berobat Jalan	2020	2021	2022
RS Pemerintah	2,70	3,44	2,29
RS Swasta	2,02	3,73	2,94
Praktik Dokter/Bidan	64,29	63,94	38,07
Klinik/Praktik Dokter Bersama	10,10	22,37	3,65
Puskesmas/Pustu	22,38	8,13	54,88
UKBM	1,82	0,00	0,35
Praktik Batra/Alternatif	1,38	0,71	0,14
Tempat Lainnya	0,70	0,00	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dari beberapa alternatif fasilitas kesehatan, Puskesmas/Pustu paling diminati oleh penduduk di Kabupaten Blora. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa 54,88 persen penduduk yang berobat jalan memilih Puskesmas/Pustu

sebagai tempat mereka berobat jalan. Kemudahan akses, kualitas penanganan dan biaya yang relatif terjangkau disinyalir menjadi alasan utama bagi penduduk untuk memilih fasilitas Puskesmas/Pustu. Adapun fasilitas kesehatan lainnya yang banyak diminati oleh penduduk Kabupaten Blora adalah praktik dokter/bidan yaitu sebesar 38,07 persen.

Meskipun fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora relatif mudah dijangkau aksesnya, masih ada sebagian penduduk yang memilih untuk tidak berobat jalan walaupun memiliki sejumlah keluhan kesehatan. Sebesar 86,97 persen di antara mereka memilih mengobati sendiri pada saat sakit dan 12,17 persen di antara mereka merasa tidak perlu untuk berobat jalan.

Tabel 2.4
Alasan Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Saat Memiliki Keluhan Kesehatan, 2020-2022

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	2020	2021	2022
Tidak punya biaya berobat	0,43	0,14	0,85
Tidak ada biaya transport	0,27	0,15	0,00
Tidak ada sarana transportasi	0,16	0,00	0,00
Waktu tunggu pelayanan lama	0,23	0,00	0,00
Mengobati sendiri	60,96	86,97	89,05
Tidak ada yang mendampingi	0,27	0,08	0,00
Merasa tidak perlu	35,95	12,17	8,89
Lainnya	1,73	0,49	1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Jaminan Kesehatan

Dalam rangka memberi keringanan akses biaya pengobatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan ini diharapkan fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia bertujuan mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini

berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

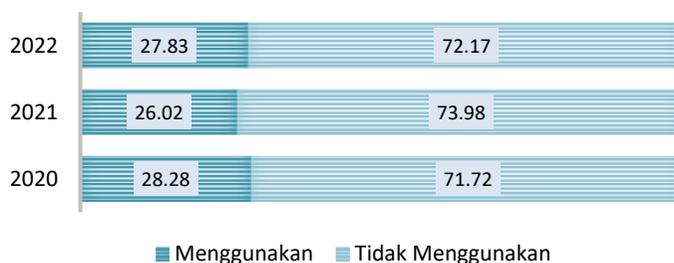
Tabel 2.5
 Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2020-2022

Jenis Jaminan Kesehatan	2020	2021	2022
BPJS	54,10	53,54	52,20
Jamkesda	0,14	0,08	0,08
Asuransi Swasta	0,17	0,58	0,09
Perusahaan/Kantor	1,43	0,15	1,75
Tidak Memiliki	44,68	45,95	45,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas Maret 2022, lebih dari 50 persen penduduk Kabupaten Blora telah memiliki jaminan kesehatan. Sebesar 52,20 persen penduduk memiliki BPJS, baik sebagai BPJS PBI maupun BPJS Non-PBI. Adapun proporsi penduduk Kabupaten Blora yang belum memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2022 ada sebesar 45,96 persen. Kemudian dalam penggunaannya, Susenas Maret 2022 menunjukkan sebesar 72,17 persen penduduk Kabupaten Blora yang berobat jalan masih belum menggunakan jaminan kesehatan.

Gambar 2.2
 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Kesehatan Ibu dan Bayi

Seorang ibu, memegang kunci penting dalam kehadiran penerus-penerus yang sehat dan berkualitas. Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan penggunaan ASI bagi balita.

Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Hasil Susenas Maret 2022 di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa dari sebesar 71,98 persen dari seluruh baduta (penduduk berumur 0-23 bulan) telah diberi ASI selama 6-23 bulan dengan rata-rata lama pemberian ASI sebesar 9,87 bulan.

Tabel 2.6
Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI, 2020-2022

Pemberian ASI	2020	2021	2022
Tidak Pernah Disusui	2,43	2,54	0,00
Pernah Disusui			
- <6 bulan	36,62	21,90	28,02
- 6-23 bulan	60,95	75,56	71,98
Rata-rata Lama Disusui (dalam bulan)	10,32	12,46	9,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Walaupun ada sebagian pihak yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi, tetapi imunisasi telah terbukti dapat meningkatkan kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi merupakan program pencegahan, sebagai benteng untuk menangkal suatu jenis penyakit tertentu.

Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, HB, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.7
 Persentase Penduduk Berusia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2020-2022

Jenis Imunisasi	2020	2021	2022
BCG	94,73	94,44	95,68
DPT	89,75	89,92	91,23
Polio	93,51	92,83	92,46
Campak/Morbili	70,02	73,44	71,08
Hepatitis B	94,70	91,10	99,99
Imunisasi Lengkap	64,68	62,87	66,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, cakupan imunisasi dasar lengkap pada penduduk berumur 0-59 bulan di Kabupaten Blora mencapai 66,02 persen. Jika dilihat dari jenis imunisasinya, dari seluruh penduduk berumur 0-59 bulan di Kabupaten Blora yang pernah mendapat imunisasi, sebesar 95,68 persen telah

menerima imunisasi BCG, 91,23 persen telah menerima imunisasi DPT, sebesar 92,46 persen telah menerima imunisasi polio, sebesar 71,08 persen telah menerima imunisasi campak/morbili, dan sebesar 99,99 persen telah menerima imunisasi Hepatitis B.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan.

Tabel 2.8
 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2020-2022

Penolong Kelahiran Terakhir	2020	2021	2022
Dokter	45,74	41,84	58,43
Bidan	52,22	57,29	41,57
Perawat	2,04	0,87	0,00
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Dukun Beranak/Paranji	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa sebesar 58,43 persen penolong persalinan terakhir di Kabupaten Blora adalah dokter dan 41,57 persen di antaranya adalah bidan. Hasil Susenas Maret 2022 tidak menemukan adanya penolong persalinan oleh perawat, tenaga kesehatan lainnya, maupun dukun tradisional. Hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Blora tentang pentingnya keberadaan tenaga medis dalam pertolongan persalinan.

<https://blorakab.bps.go.id>



BAB 3 PENDIDIKAN

KONDISI PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI DI KABUPATEN BLORA

1,16%
Diploma

4,70%
S1, S2, S3

Tahukah Anda???



Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Blora yang berijazah tertinggi Diploma mencapai 1,16% sedangkan S1, S2, dan S3 mencapai 4,70%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022

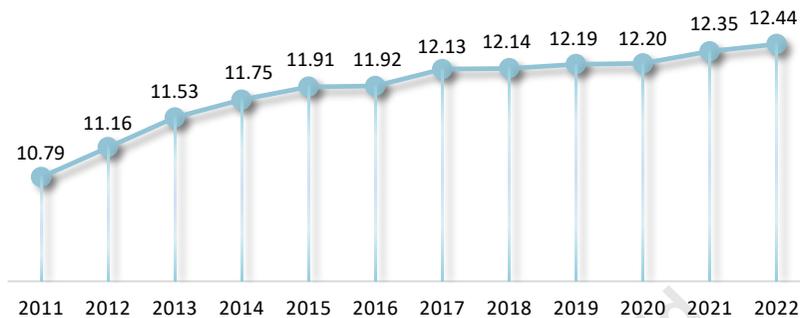
Pendidikan menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* dalam *goal* ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Disamping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan dengan berbagai upaya seperti pembangunan sarana prasarana sekolah, program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Sampai saat ini sektor pendidikan masih menjadi prioritas dalam pembangunan karena masih banyaknya masalah mendasar dalam bidang pendidikan, diantaranya angka putus sekolah masih cukup tinggi dan kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Gambar 3.1
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blora, 2010-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

HLS Kabupaten Blora tahun 2022 sebesar 12,44 tahun. Artinya secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 di Kabupaten Blora memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,44 tahun atau setara dengan SMA/Sederajat atau semester awal jenjang perguruan tinggi.

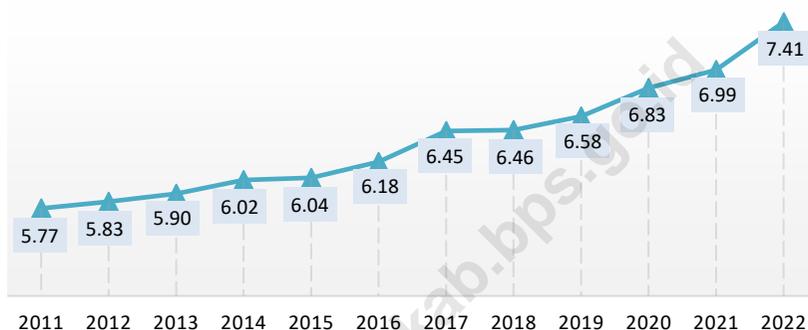
Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. RLS digunakan untuk pada IPM dengan metode lama maupun baru guna mengukur pada dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS

dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan dari metode baru, RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 3.2
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora, 2011-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

RLS Kabupaten Blora pada tahun 2022 mencapai 7,41 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Blora rata-rata telah dapat menempuh pendidikan selama 7,41 tahun atau setara lulusan SD dan menginjak jenjang SMP/Sederajat kelas 1. Dilihat dari kecenderungan sepuluh tahun terakhir, RLS Kabupaten Blora selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, semakin luas pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Telah dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat

menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 3.1

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2019-2021

Ijazah Tertinggi	2020	2021	2022
Tidak Punya Ijazah SD	25,93	22,58	22,55
SD/Sederajat	26,27	27,84	27,91
SMP/Sederajat	22,38	22,96	23,10
SMA/ke atas	19,63	21,38	20,73
Diploma	0,74	0,98	1,16
S1, S2, S3	5,05	4,26	4,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa 22,55 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora tidak memiliki ijazah formal. Sedangkan proporsi penduduk yang memiliki ijazah setingkat SD ada sebesar 27,91 persen. Meskipun demikian, ada kecenderungan bahwa proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan dalam tiga tahun terakhir.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan indikator-indikator tersebut akan mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk

dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Umur penduduk dalam penghitungan APS pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/SMK. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022

APS	2020	2021	2022
7-12	99,98	99,88	99,90
13-15	99,04	98,82	96,63
16-18	73,13	73,75	78,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Blora selalu di atas 99 persen dalam tiga tahun terakhir. APS penduduk usia 13-15 tahun tahun 2022 sebesar 96,63 persen dengan rincian 95,90 persen perempuan dan 97,48 persen laki laki. Selanjutnya, APS penduduk usia 16-18 tahun 2022 sebesar 78,21 persen dengan komposisi 81,07 persen perempuan dan 75,34 persen laki laki.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya sehingga APM akan selalu lebih kecil dibandingkan APS. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk

anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022

APM	2020	2021	2021
SD	95,93	95,95	99,90
SMP	76,43	77,56	77,49
SMA	57,23	57,83	58,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Dalam tiga tahun terakhir, APM jenjang pendidikan di Kabupaten Blora terlihat fluktuatif. Pada tahun 2022, APM SD Kabupaten Blora mencapai 99,90 persen, yang berarti sebesar 99,90 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Blora sedang bersekolah di jenjang SD/Sederajat. Adapun APM SMP Kabupaten Blora sebesar 77,49 persen dan APM SMA Kabupaten Blora sebesar 58,59 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan jumlah siswa yang sedang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, besarnya APK bisa melebihi 100 persen karena angka ini tidak memperhatikan faktor umur. Kondisi ini menggambarkan adanya kemungkinan

siswa yang tinggal kelas dan siswa terlambat atau terlalu cepat memasuki jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020-2022

APK	2020	2021	2022
SD	107,70	109,24	108,49
SMP	96,01	97,06	99,32
SMA	87,30	85,16	85,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa ada kenaikan APK SMP di tahun 2022. Sebaliknya, APK SD mengalami penurunan pada tahun 2022. Fenomena naik turunnya APK tersebut menunjukkan bahwa ada sejumlah penduduk dari kelompok umur 7-12 tahun yang telah beranjak naik ke jenjang SMP sehingga proporsi APK SMP meningkat.

<https://blorakab.bps.go.id>

BAB 4 KETENAGAKERJAAN

KONDISI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BLORA 2022

PENGANGGURAN TURUN



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

4,54% ↑ **75,08%**
dari tahun 2021



Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* yang merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok

berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja, baik statusnya bekerja maupun pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terkait dengan kegiatan bekerja secara produktif, melainkan melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Blora yang termasuk dalam usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 692.067 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 519.616 orang yang terdiri dari 468.013 orang penduduk yang bekerja dan 19.243 orang penduduk yang menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen dari tahun sebelumnya, namun jumlah orang yang menganggur juga mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.1
Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan di Kabupaten Blora, 2020-2022

Kegiatan Utama	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	684.356	688.321	692.067
Angkatan Kerja	492.071	485.525	519.616
Bekerja	468.013	467.018	500.373
Menganggur	24.058	18.507	19.243
Bukan Angkatan Kerja	192.285	202.796	172.451

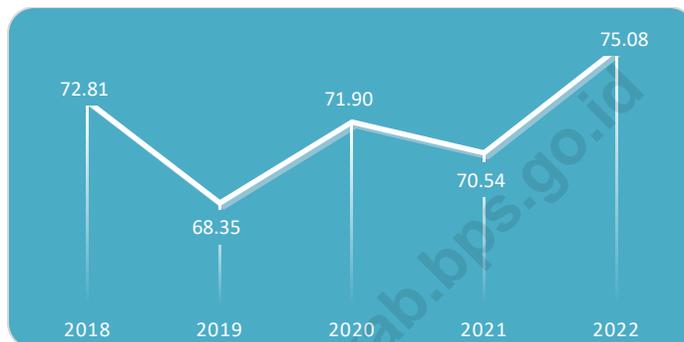
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan melalui gambaran tentang besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kendati demikian, analisis TPAK semata tanpa variabel lainnya kurang menarik karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang tinggi karena proporsi

penduduk bekerja yang besar bisa memberikan gambaran kasar tentang penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan TPAK yang tinggi karena proporsi penduduk menganggur yang besar justru menggambarkan suatu fenomena sulitnya tenaga kerja untuk terserap ke dalam pasar.

Gambar 4.1
Perkembangan TPAK Kabupaten Blora, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

TPAK Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 75,08 persen, dibandingkan setahun sebelumnya yaitu sebesar 70,54 persen. TPAK 2022 menggambarkan bahwa sebesar 75,08 persen dari jumlah penduduk usia kerja aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), juga biasa digunakan dalam analisis angkatan kerja khususnya untuk mengukur pengangguran. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka ini tidak mencakup mereka yang bersekolah atau mengurus rumah tangga karena mereka tidak termasuk dalam angkatan kerja. Dalam formulasinya, TPT berasal dari

perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 4.2
Perkembangan TPT Kabupaten Blora, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan juga dapat tercermin dari TPT. Tingginya TPT dapat mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak cukup luas untuk menampung banyaknya pencari kerja Dalam lima tahun terakhir. Hasil Sakernas Agustus 2018-2022 menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Blora memiliki kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka TPT Kabupaten Blora di tahun 2022 sebesar 3,70 persen, atau turun dari TPT 2020 sebesar 0,11 persen.

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh/membantu memperoleh pendapatan/keuntungan/upah/gaji. Secara absolut, pengangguran terbuka 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan, sebaliknya penduduk yang

bekerja mengalami peningkatan. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, karakteristiknya penduduk yaitu lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, maupun pendidikan tertinggi yang ditamatkan perlu dianalisis lebih lanjut.

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

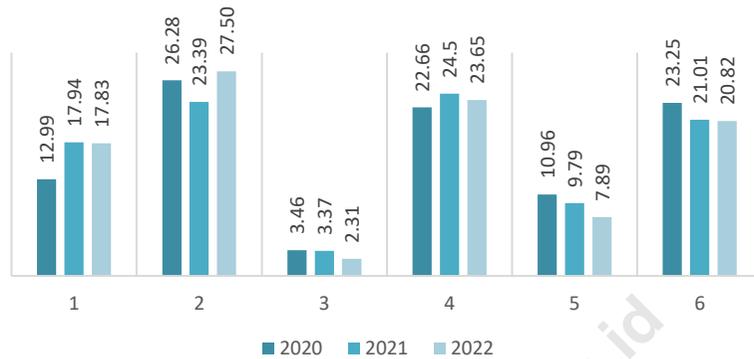
Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Gambar 4.3 menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha 3 kategori, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa.

Selama periode 2021—2022, kategori pertanian dan manufaktur mengalami penurunan dalam hal proporsi penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, kategori jasa justru mengalami kenaikan. Semakin pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab naiknya penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Gambar 4.4 menunjukkan persentase penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama. Sebagian besar penduduk bekerja di tahun 2022 berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (kode 2) dan buruh/karyawan/pegawai (kode 4). Penduduk bekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (kode 3) dan pekerja bebas (kode 6) memiliki persentase terkecil diantara status pekerjaan lainnya.

Gambar 4.4

Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

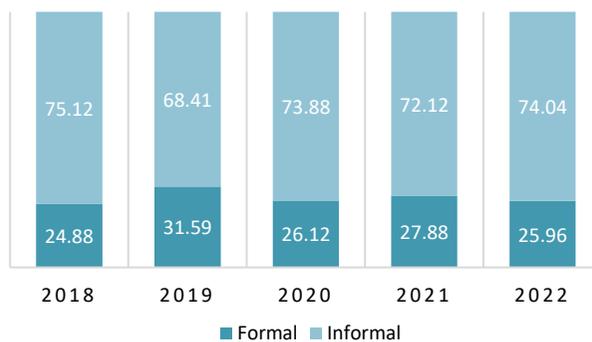
Catatan:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas;
6. Pekerja keluarga

Gambar 4.5 menunjukkan penduduk bekerja berdasarkan kegiatan formal/informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerjaan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh, karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

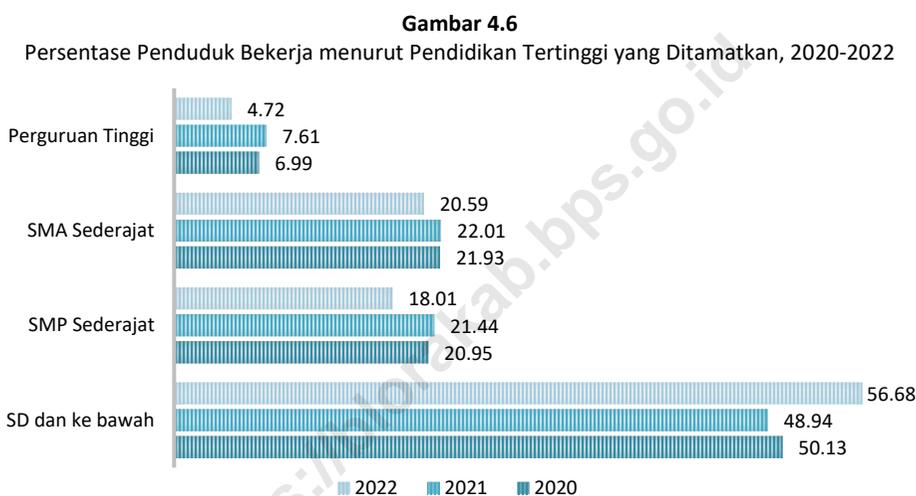
Gambar 4.5

Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

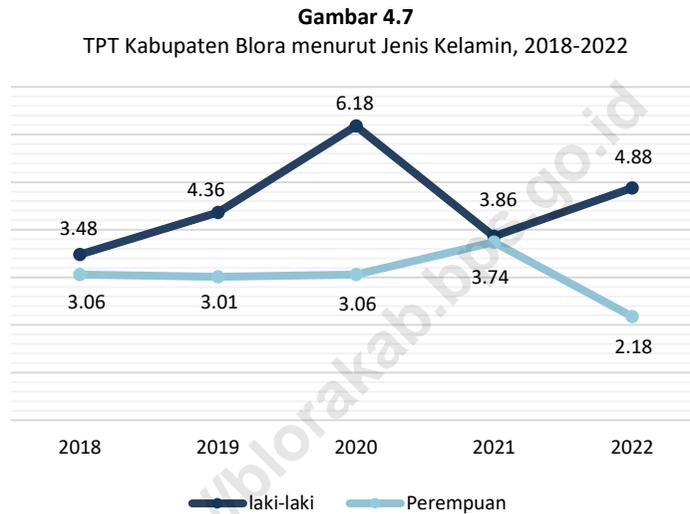
Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerjaan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh, karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).



Penyerapan tenaga kerja hingga status 2022 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu SMP ke bawah dengan persentase lebih dari 70 persen. Proporsi penduduk bekerja dengan pendidikan rendah pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2021 penduduk bekerja dengan pendidikan SD dan ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat & tamat SD) sebesar 48,94 persen, angka tersebut naik cukup tinggi 7,74 persen menjadi 56,68 persen. Sebaliknya, penduduk bekerja dengan pendidikan menengah/tinggi cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk yang berpendidikan rendah umumnya bekerja pada sektor pertanian karena pada umumnya sektor tersebut tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

Karakteristik Penganggur

Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam lima tahun terakhir. Pada 2022, TPT laki-laki mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, TPT perempuan mengalami penurunan ke level terendah selama lima tahun terakhir.

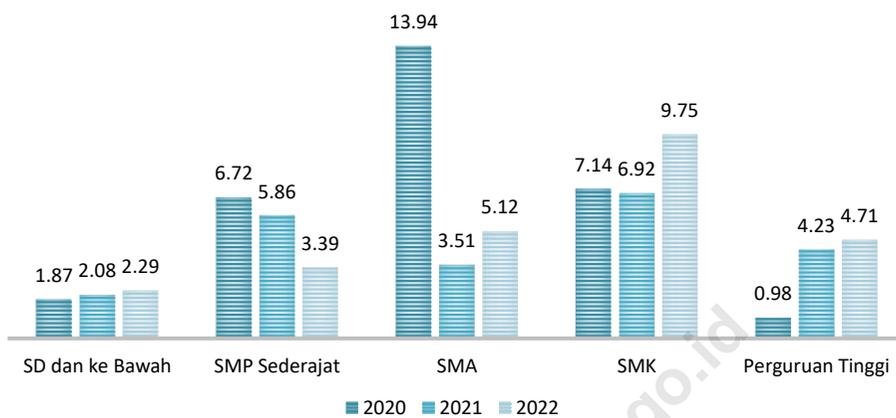


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada 2022, pengangguran dengan jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan tersebut mencapai 42,18 persen. Namun, TPT penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan selain SMP, mengalami kenaikan. Pengangguran dengan pendidikan tertinggi SMA dan SMK mengalami peningkatan TPT tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 45,79 persen dan 40,88 persen.

Gambar 4.8

TPT Kabupaten Blora menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora



BAB 5 PERUMAHAN

KONDISI STATUS PENGUASAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN BLORA

95,23%
Milik Sendiri

4,77%

**Bukan Milik
Sendiri**

Pada Tahun 2022 Masih Terdapat 4,77%
Rumah Tangga yang Status Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggalnya Bukan
Milik Sendiri



Pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu dikembangkan secara terpadu. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas umum. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya juga menjadi penentu indikator kesejahteraan manusia.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Rumah yang sehat dengan kualitas baik akan membuat masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, rumah yang tidak sehat memungkinkan masyarakat mudah terpapar penyakit. Kualitas rumah tinggal dipengaruhi oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Beberapa kriteria kualitas rumah dapat dilihat dari hasil Susenas, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, serta fasilitas yang dimiliki.

Status Penguasaan Tempat Tinggal

Sebagai sebuah kebutuhan dasar, setiap rumah tangga akan berusaha memenuhi kebutuhan perumahan dengan berbagai cara. Kondisi ekonomi masing-masing rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ini. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan lebih mudah dibanding mereka yang berpenghasilan rendah.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa sebesar 95,23 persen rumah tangga di Blora telah menempati rumah dengan status milik sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri selalu mengalami peningkatan di mana pada tahun 2020 mencapai 93,14 persen

kemudian meningkat menjadi 94,18 persen di tahun 2021 dan naik lagi di tahun 2022.

Tabel 5.1

Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2020-2022

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2020	2021	2022
Milik Sendiri	93,14	94,18	95,23
Bukan Milik Sendiri	6,86	5,82	4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini mencakup kelayakan pada atap, dinding, dan lantai yang dimiliki rumah tinggal tersebut.

Atap menjadi salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal karena berfungsi sebagai pelindung dari hujan maupun panas. Oleh karena itu atap biasanya dipilih dari bahan yang dapat melindungi secara maksimal. Atap dikatakan layak apabila terbuat dari beton, genteng, sirap, seng atau asbes. Meskipun demikian, jenis atap tidak selamanya menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pemilihan jenis atap dapat dipengaruhi oleh preferensi masyarakat suatu daerah sesuai kondisi geografisnya.

Tabel 5.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2020-2022

Indikator Kualitas Perumahan	2020	2021	2022
Lantai Bukan Tanah (%)	57,61	56,80	60,91
Atap beton, genteng, seng dan asbes (%)	99,81	99,82	99,30
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,27	99,04	99,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dinding yang baik biasanya terbuat dari bahan yang kedap air sehingga dinding tidak lembab atau basah dan tidak berlumut. Dengan demikian standar

kesehatan akan terpenuhi. Rumah dikatakan layak huni di antaranya jika dinding terbuat dari tembok atau kayu.

Ditinjau dari segi kesehatan, rumah dengan lantai dari tanah dianggap kurang layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Secara umum, kondisi perumahan di Blora telah memenuhi kriteria rumah layak huni. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Blora telah memiliki jenis atap terluas berupa beton, genteng, seng dan asbes (99,30 persen). Sedangkan proporsi rumah yang berdinding layak (terbuat dari tembok atau kayu) di Kabupaten Blora ada sebesar 99,12 persen. Adapun terkait kriteria jenis lantai, meskipun sebesar 60,91 persen rumah tangga di Kabupaten Blora telah memiliki bangunan tempat tinggal dengan jenis lantai terluas bukan tanah, tetapi proporsi tersebut termasuk kecil jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk tempat tinggal adalah luas lantai hunian. Rumah dengan luas lantai yang memadai akan memberi keluasaan aktivitas dan kenyamanan bagi penghuninya.

Tabel 5.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2020-2022

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m ²)	2020	2021	2022
<20	0,31	0,10	0,06
20-49	3,38	4,70	4,41
50-99	33,57	24,75	25,41
100-149	28,98	34,83	25,91
150+	33,76	35,62	44,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa sebesar 70,12 persen rumah di Blora memiliki luas lebih dari 99 m². Hal tersebut dimungkinkan karena karakteristik wilayah Blora yang sebagian besar merupakan daerah perdesaan.

Meskipun demikian, persentase rumah dengan luas kurang dari 20 m² tampak masih ada walaupun proporsinya relatif kecil.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Tabel 5.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita, 2020-2022

Luas Lantai Perkapita (m ²)	2020	2021	2022
≤ 7,2 m ²	0,11	0,10	1,04
7,3 – 9,9 m ²	0,25	0,58	0,40
≥ 10 m ²	99,64	99,32	98,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, 98,56 persen rumah tangga di Kabupaten Blora di tahun 2021 telah memiliki rumah dengan luas lantai perkapita minimal 10 m².

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama

untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 5.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2020-2022

Fasilitas Perumahan	2020	2021	2022
Penerangan Listrik PLN	99,97	99,84	99,84
Jamban Sendiri	86,73	91,07	88,45
Penggunaan Gas Elpiji untuk Bahan Bakar Memasak	80,09	82,39	85,31
Air Minum Kemasan/ Isi Ulang/ Leding	52,85	57,12	56,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

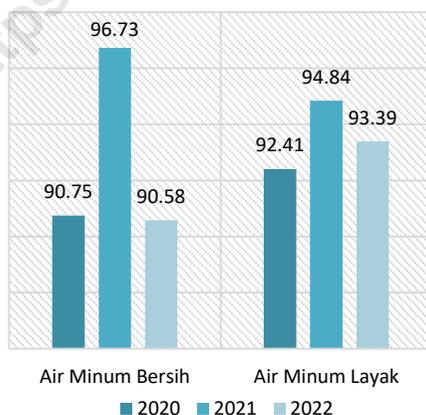
Sumber penerangan yang ideal adalah listrik, baik yang berasal dari PLN maupun non-PLN, karena cahaya dari listrik lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Penggunaan fasilitas penerangan listrik sudah dimanfaatkan oleh hampir seluruh penduduk. Pada tahun 2022, sebesar 99,84 persen rumah tangga di Kabupaten Blora telah menggunakan sumber listrik sebagai penerangan utama.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri menunjukkan bahwa sebesar 88,45 persen rumah tangga di Kabupaten Blora pada tahun 2022 telah menggunakan jamban sendiri sebagai tempat buang air besar. namun, angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya (91,07 persen).

Sejak berlakunya program konversi (pengalihan pemakaian) minyak tanah ke elpiji 3 kg tahun 2007, masyarakat mulai melakukan peralihan bahan bakar memasak dari minyak tanah, arang, kayu bakar atau lainnya ke pemakaian elpiji. Pemakaian elpiji yang lebih praktis, efisien, dan bersih, dibandingkan bahan bakar lainnya membuat pengguna elpiji terus meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan elpiji merupakan salah satu fasilitas rumah tangga yang mencerminkan masyarakat yang lebih modern. Rumah tangga pengguna gas elpiji di Kabupaten Blora pada tahun 2022 ada sebesar 85,31 persen. Jika dilihat tren dalam tiga tahun terakhir, terlihat bahwa proporsi penggunaan elpiji untuk memasak oleh masyarakat Kabupaten Blora semakin naik dari tahun ke tahun.

Adapun penggunaan air minum kemasan/air isi ulang/air leding sebagai sumber utama air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Blora ada sebesar 56,18 persen. Proporsi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 57,12 persen.

Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Air Minum, 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Ketersediaan air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur

terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Pada tahun 2022, rumah tangga di Kabupaten Blora yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum mencapai 90,58 persen. Di sisi lain, rumah tangga yang memiliki akses untuk mendapatkan air layak sebagai sumber air minum ada sebesar 93,39 persen.

<https://blorakab.bps.go.id>

<https://blorakab.bps.go.id>



BAB 6 POLA KONSUMSI

PERSENTASE PENGELUARAN MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA 2022



Makanan
55,56%



Bukan
Makanan
44,44%

Persentase rata-rata pengeluaran
perkapita sebulan masyarakat Kabupaten
Blora sebanyak 55,56% untuk kebutuhan
makanan yaitu sebesar Rp 562.948,-



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Besarnya pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi makanan dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, biasanya akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran non makanan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi akan lebih besar.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluarannya. Hal ini terjadi karena pada umumnya elastisitas permintaan terhadap makanan cukup rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap non makanan cukup tinggi. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, pendapatan yang meningkat akan digunakan untuk konsumsi barang non makanan atau ditabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Pengeluaran makanan mencakup rata-rata biaya yang dikeluarkan per orang (per kapita) untuk memenuhi kebutuhan makanan, baik berupa bahan makanan maupun makanan jadi. Termasuk didalamnya pengeluaran untuk minuman beralkohol, rokok dan tembakau. Sementara pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk pakaian, perumahan, rekreasi/hiburan, informasi, kesehatan dan sebagainya.

Dalam publikasi ini ditampilkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Artinya, untuk pengeluaran rumahtangga tentunya harus dikalikan dengan jumlah anggota rumah tangganya terlebih dahulu.

Tabel 6.1

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2020-2022

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
Makanan	467.340	500.984	562.948
Bukan Makanan	434.792	407.278	450.251
Jumlah	902.132	908.262	1.013.199

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan merupakan hasil bagi antara total pengeluaran konsumsi seluruh penduduk selama sebulan dengan jumlah penduduk. Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp908.262 di tahun 2021 menjadi Rp1.013.199 di tahun 2022.

Selanjutnya jika dilihat dari persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan dan bukan makanan yang dirinci menurut jenis komoditasnya, dalam tiga tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan kenaikan distribusi pengeluaran rata-rata perkapita per bulan untuk kelompok makanan yaitu dari 51,80 persen pada tahun 2020 menjadi 55,16 persen pada tahun 2021 dan naik kembali menjadi 55,56 persen di tahun 2022.

Sebaliknya pada kelompok komoditas bukan makanan, terjadi kecenderungan penurunan distribusi pengeluaran rata-rata yaitu dari 48,20 persen pada tahun 2020 menjadi 44,84 persen pada tahun 2021, dan turun kembali menjadi 44,44 persen pada tahun 2022. Secara teori, dapat di artikan bahwa kondisi perekonomian di Blora dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Di sisi lain, kondisi pandemi mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Masih terbatasnya mobilitas dan akses hiburan, di dukung berkurangnya pendapatan memaksa masyarakat untuk membatasi pengeluaran non makanan dan menambah pengeluaran makanan dengan asumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Tabel 6.2
 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Pengeluaran
 2020-2022

Jenis Komoditas	2020	2021	2021
Total makanan	51,80	55,16	55,56
Padi-padian	6,05	6.42	5,23
Umbi-umbian	0,22	0.34	0,27
Ikan	1,77	2.12	1,78
Daging	1,80	2.24	2,06
Telur dan susu	2,27	2.59	2,31
Sayur-sayuran	4,08	4.85	4,09
Kacang-kacangan	1,25	1.56	1,45
Buah-buahan	2,38	2.38	2,40
Minyak dan lemak	1,50	1.68	1,90
Bahan minuman	1,53	1.75	1,49
Bumbu-bumbuan	1,03	1.16	1,14
Konsumsi lainnya	0,85	1.06	0,99
Makanan minuman jadi	20,08	19.68	22,58
Rokok dan tembakau	6,98	7.33	7,88
Total bukan makanan	48,20	44,84	44,44
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	19,27	19.92	19,52
Aneka barang dan jasa	12,14	11.73	12,77
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,73	2.29	2,28
Barang tahan lama	7,83	5.94	4,30
Pajak, pungutan dan asuransi	3,26	3.58	3,84
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2,97	1.39	1,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Adapun jika dilihat lebih rinci per komoditas, maka dapat dilihat bahwa makanan dan minuman jadi, pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pengeluaran aneka barang dan jasa merupakan tiga komoditas yang paling besar proporsinya dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Blora.

Anomali terjadi pada pengeluaran untuk rokok dan tembakau dimana pada kondisi pandemi persentase pengeluarannya malah meningkat. Hal ini cukup

memprihatinkan karena pandemic covid menyerang system pernafasan sementara rokok dan tembakau akan meningkatkan resiko dan memperburuk kondisi.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang memenuhi konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gr protein.

Tabel 6.3
Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Perhari 2020-2022

Jenis Konsumsi	2020	2021	2022
Kalori (kkal)	2.152	2.162	2.128
Protein (gram)	59,90	60,81	61,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Blora sebesar 2.128 kkal atau turun sebesar 34 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Blora mengalami peningkatan, yaitu dari 60,81 gr pada tahun 2021 menjadi 61,88 gr pada tahun 2022. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa syarat kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gr per hari telah terpenuhi.

<https://blorakab.bps.go.id>



BAB 7 KEMISKINAN

BAGAIMANA KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA?

99,83 ribu jiwa

**Jumlah Penduduk
Miskin Blora 2022**

11,53%

**Persentase Penduduk
Miskin Blora 2022**

Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (jumlah penduduk miskin sebanyak 107,05 ribu jiwa atau 12,39%)



Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Dibanyak negara upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan memacu angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan jika tidak diiringi dengan pendistribusian atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sampai saat ini banyak program-program yang telah ditelorkan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Pengurangan kemiskinan berjalan lambat. Banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya sekedar memberi kail bagi si miskin, tetapi perubahan budaya, pola pikir dan semangat untuk maju juga perlu terus ditanamkan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

Perkembangan Penduduk Miskin

Sejak 2006 sampai sebelum pandemi Covid-19, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Blora terus menurun. Hal ini tentunya merupakan capaian yang baik dimana upaya pengentasan kemiskinan bergerak ke arah yang benar. Namun seiring dengan datangnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Blora mengalami peningkatan.

Gambar 7.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pada periode 2006-2019, penduduk miskin di Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora tercatat sebesar 197,60 ribu jiwa atau 23,95 persen dari jumlah seluruh penduduk Blora. Kemudian jumlah penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun dan pada 2019 telah turun menjadi 97,86 ribu jiwa atau 11,32 persen.

Namun, berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai respon pemerintah atas munculnya pandemi Covid-19 sejak triwulan pertama tahun 2020 berimbas terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2021 dan menyebabkan penduduk miskin meningkat menjadi 107,05 ribu jiwa. Seiring dilaksanakannya vaksinasi masal dan

berbagai program pemulihan ekonomi nasional, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora turun menjadi 99,83 ribu jiwa atau 11,53 persen.

Gambar 7.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2006 hingga 2021. Garis kemiskinan adalah suatu batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Sebagai contoh, tahun 2022 garis kemiskinan di Blora sebesar Rp390.478. Hal ini berarti apabila satu rumah tangga yang terdiri dari 4 anggota memiliki pengeluaran perbulan untuk makanan dan non makanan kurang dari Rp1.561.912 maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Hingga tahun 2020 perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Blora cenderung menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan bergerak ke arah yang semakin sempit. Namun di tahun 2021, kesenjangan kembali melebar dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2022.

Tabel 7.1
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2006-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (GK)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2006	126.957	2,93	0,65
2007	132.933	3,02	0,66
2008	144.710	5,12	1,61
2009	174.951	2,38	0,51
2010	190.356	2,38	0,61
2011	206.016	2,35	0,51
2012	221.088	2,19	0,47
2013	237.850	2,39	0,59
2014	248.903	2,09	0,50
2015	257.581	2,08	0,54
2016	279.972	2,17	0,54
2017	291.114	1,53	0,31
2018	308.520	1,62	0,37
2019	335.837	1,59	0,34
2020	353.259	1,39	0,21
2021	363.649	1,82	0,40
2022	390.478	1,80	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Sebaliknya semakin rendah indeks keparahan kemiskinan, artinya pengeluaran diantara penduduk miskin semakin merata. Kondisi serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga cenderung mengalami penurunan sejak 2008 sampai

2020. Namun, indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022.

<https://blorakab.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**

Jl. Rajawali No 12, Blora, 58211

Telp.(0296) 531191

Homepage: blorakab.bps.go.id Email: bps3316@bps.go.id